

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kompleksitas dunia bisnis saat ini, isu etika menjadi sangat penting dalam kehidupan organisasi, termasuk dalam instansi pemerintah. Pemerintah sebagai pengelola kebijakan publik dan pengawasan kegiatan masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika untuk mewujudkan pelayanan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Etika juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi penilaian etis individu dalam konteks instansi pemerintahan perlu dilakukan.

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh berbagai macam profesi di era modern dan bebas saat ini telah menjadi suatu permasalahan yang sangat umum terjadi, tidak hanya dilakukan oleh kalangan profesi tingkat atas, tetapi juga di kalangan profesi tingkat bawah (Rizal dalam Aziz & Cahyonowati, 2015). Di Indonesia, profesi akuntansi juga banyak mengalami pelanggaran etika dan isu permasalahan lain yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (Susilawati dkk., 2022). Pelanggaran itu tentu akan berpotensi merusak kepercayaan terhadap profesionalisme dan etika perilaku para akuntan. Contoh pelanggaran yang sering terjadi di kalangan akuntan dan organisasi masih sering kali mengabaikan perilaku etis dan lebih memilih untuk melakukan perilaku menyimpang, seperti

kecurangan, penipuan, penggelapan pajak, dan penyuapan (Susilawati dkk., 2022). Sikap ini jelas melanggar kode etik yang berlaku dalam profesi. Pelanggaran etika ini sebagian besar dilakukan dengan alasan mencari kesejahteraan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya pada pihak lain (Sugiantari & Widanaputra, 2016). Skandal yang terjadi akibat pelanggaran etika ini menyebabkan dampak yang luas, baik bagi individu atau kelompok yang berencana terlibat dalam profesi akuntansi, maupun bagi mereka yang sudah terlibat di dalamnya (Aziz dan Cahyonowati, 2015). Pelanggaran etika juga berdampak bagi kelangsungan hidup perusahaan dan hilangnya kepercayaan publik (Margerety, 2022). Meskipun seharusnya organisasi dan akuntan menerapkan etika profesi untuk menghindari pelanggaran ini, namun masih terjadi permasalahan tersebut. Artinya penerapan kode etik dalam profesi masih kurang efektif dan perlu ditingkatkan.

Kasus yang melibatkan PT Garuda pada tahun 2018 telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam konteks akuntansi di Indonesia. Meskipun laporan keuangan perusahaan menunjukkan laba sebesar Rp 72,5 miliar, fakta sebenarnya mengungkap bahwa Garuda mengalami kerugian yang cukup besar, yakni mencapai Rp 2,53 triliun (Christian dkk., 2022). Kasus ini juga menimbulkan implikasi serius terhadap akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan, yang berasal dari kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan (Oktaviana Dewi dkk., 2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu

mengambil langkah tegas dengan memberlakukan sanksi berupa pembekuan izin praktik akuntan publik dan kantor akuntan publik tersebut selama 12 bulan (Kementerian Keuangan, 2019). Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam praktik akuntansi di Indonesia, sekaligus menegakkan integritas dalam pelaporan keuangan.

Sebagai contoh kasus lainnya, mantan Kepala Desa Sundamekar, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, telah diamankan dan ditahan di Lapas kelas IIB Sumedang karena diduga melakukan penyelewengan dana desa dengan nominal lebih dari setengah miliar rupiah. Tindakan korupsi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019, saat masih menjabat sebagai kepala desa. Pihak Kejaksaan Negeri Sumedang telah menerima berkas P21 dari Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Sumedang terkait kasus tersebut. Barang bukti yang diterima termasuk beragam dokumen, seperti nota pencairan dana. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Desa Sundamekar memiliki aturan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB-Des). Berdasarkan laporan audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten Sumedang, ditemukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 558 juta. Perbuatan terdakwa melanggar Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kiki Andriana, 2023).

Kasus penyelewengan dana desa dan manipulasi laporan keuangan Garuda mencerminkan adanya moral relativisme dalam pengambilan

keputusan bisnis, di mana standar etika objektif diabaikan demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai etika dalam perusahaan dan lembaga publik guna menjaga kepercayaan masyarakat serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

Dalam Islam pun perbuatan kecurangan dilarang dan dianggap sebagai perilaku yang tercela. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berlaku jujur, adil, dan menghormati hak-hak orang lain. Kitab Suci Al-Quran memuat beberapa ayat yang melarang perbuatan curang. Salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan larangan mengambil harta milik orang lain secara tidak adil, termasuk melalui praktik penipuan, kecurangan, atau perilaku curang lainnya. Dalam ajaran Islam, sangat ditekankan nilai kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola harta serta menghormati hak-hak orang lain.

Perilaku etis merujuk pada tindakan seseorang yang sesuai dengan hukum, peraturan, dan nilai moral yang telah ditetapkan (Alfitriani, Erawati, & Suyanto, 2021). Penting sekali menerapkan perilaku yang beretika di berbagai bidang profesi, termasuk dalam bidang akuntansi. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan

tindakan yang menyimpang dari hukum (Ethika, 2020). Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggotanya, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di sektor bisnis, di instansi pemerintah, maupun di lingkungan pendidikan dalam menjalankan tanggung jawab profesional mereka (Hermawan & Hanun, 2018). Penting bagi akuntan untuk menjalankan perannya dalam menjaga kepentingan publik dan memastikan pengelolaan keuangan yang baik. Sifat etis yang kuat menjadi dasar yang sangat penting dalam pekerjaan akuntan karena mereka memiliki akses ke informasi keuangan yang bersifat sensitif dan memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan bisnis yang dapat berdampak signifikan.

Relativisme adalah suatu pandangan yang mengemukakan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan sebagai etis atau tidak, benar atau salah, bergantung pada sudut pandang masyarakat yang mengamati (Forsyth, 1992). Relativisme merupakan model cara berpikir pragmatis, alasannya bahwa tidak ada standar etika yang universal atau objektif yang berlaku untuk semua situasi atau budaya (Ariyanti & Widanaputra, 2018). Pandangan tersebut menyatakan bahwa etika bergantung pada konteks budaya, sejarah, nilai-nilai, norma, dan keyakinan masyarakat tertentu. Faktor ini timbul karena tiap individu dan kelompok memiliki sudut pandang etika yang beragam. Dalam konteks penilaian moral, setiap orang akan mengacu pada norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Oleh

karena itu, penilaian tentang kebenaran atau kesalahan suatu tindakan dapat bervariasi, tergantung pada sudut pandang, latar belakang budaya, dan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Berdasarkan penelitian terdahulu Oboh (2019) menunjukkan bahwa moral idealisme berpengaruh signifikan terhadap penilaian etis, sedangkan moral relativisme tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian etis. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ismail dan Rasheed (2019) idealisme berpengaruh positif signifikan terhadap penilaian etis sedangkan relativisme berpengaruh negatif terhadap penilaian etis.

Maraknya praktik kecurangan oleh perusahaan, mendorong perusahaan untuk menekankan pentingnya pada operasi perusahaan yang beretika, dengan tujuan menjalankan praktik bisnis sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh norma-norma etika industri. Sehingga peran etika bisnis dalam perusahaan sangatlah penting. Perusahaan dalam pengoperasiannya perlu memerhatikan prinsip-prinsip etika baik di dalam maupun di luar organisasi. Etika bisnis berperan sebagai pedoman dan standar bagi karyawan serta manajemen dalam melaksanakan tugas tugasnya. Nilai etika perusahaan (*corporate ethical value*) merupakan suatu rangkaian etis yang terdapat di dalam organisasi (Dewayanti dkk., 2022). Menurut Hunt, Wood, dan Chonko (1989) nilai etika perusahaan diartikan sebagai bagian dari budaya organisasi mencerminkan interaksi multidimensi di antara berbagai sistem kontrol perilaku formal dan informal. *Corporate ethical value* (CEV) meliputi nilai-nilai etika yang

dimiliki secara kolektif oleh para karyawan serta mencakup kebijakan formal maupun informal tentang etika yang ada di dalam organisasi tersebut (Sharma, Borna, dan Stearns 2009). Seperti yang dikemukakan oleh Nicotera dan Cushman, (1992) setiap tindakan akan dianggap etis apabila tindakan tersebut sejalan dengan sistem nilai organisasi itu. Sehingga nilai-nilai etika perusahaan dapat membantu mengidentifikasi apa yang dianggap benar dan salah sebagai dasar pengambilan keputusan yang etis (Kaur dan Sharma, 2016). Pada penelitian Ghazali (2021) nilai etika perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penilaian etis. Penelitian itu menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mempromosikan nilai-nilai etika dapat mempengaruhi individu untuk menjadi lebih etis dalam pengambilan keputusan.

Probabilitas efek mengacu pada kemungkinan bahwa tindakan itu benar-benar akan terjadi dan kemungkinan bahwa tindakan itu akan menyebabkan kerugian atau manfaat (McMahon & Harvey, 2007a). Dalam penilaian etis, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil. *Probability of effect* berarti mengevaluasi sejauh mana kemungkinan dampak dari tindakan tersebut, baik dampak positif (manfaat) maupun dampak negatif (kerugian). Pada penelitian Narsa dan Prananjaya (2017) probabilitas efek merupakan salah satu dari enam variabel intensitas moral yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis.

Penilaian etis merupakan proses mengevaluasi atau menilai tindakan, keputusan, atau perilaku individu, organisasi terhadap standar dan nilai moral yang dianggap benar atau salah dalam konteks tertentu. Penilaian etis merupakan hal yang dilakukan pegawai terhadap organisasi ataupun sesama pegawai dalam menjalankan perilaku etis (Gholami dkk., 2015). Tujuan utama model teoritis penilaian etis adalah untuk menjelaskan dan memprediksi proses pengambilan keputusan etis serta faktor yang mendasari pengambilan keputusan etis sebagai bagian akhir dari penilaian etis (Herlina & Sudaryati, 2020)

Pengakuan etis merupakan kemampuan individu untuk menginterpretasikan apakah suatu situasi tertentu etis atau tidak (Narsa dan Prananjaya, 2017). Menurut Winata (2014) pengakuan etis yaitu suatu pengakuan oleh individu bahwa potensi keputusan atau tindakan individu tersebut dapat mempengaruhi keinginan, kesejahteraan, atau harapannya sendiri kepada pihak lain melalui suatu cara yang dapat menimbulkan pertentangan pada satu atau lebih prinsip-prinsip etis. Oleh karena itu, pengakuan etis mencerminkan kesadaran individu terhadap dampak tindakannya terhadap orang lain dan lingkungan. Pada dasarnya ketika individu menyadari potensi konsekuensi etis dari keputusan dan tindakan, individu akan lebih mampu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Pengakuan tersebut merupakan langkah awal yang penting menuju perilaku yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Teori perkembangan moral Kohlberg (1969 & 1976) menyatakan bahwa perkembangan moral individu dipengaruhi oleh proses berpikir dan berpendapat. Semakin tinggi perkembangan moral yang telah dicapai oleh individu, semakin tinggi kemampuannya untuk mempertimbangkan keputusan secara etis, sehingga dapat membuat penilaian etis yang lebih baik (Marta & Serly, 2023). Terdiri dari tiga tingkatan perkembangan moral menurut Kohlberg (1969 & 1976) dengan masing-masing terbagi menjadi dua tahapan yaitu: Tingkat pra-konvensional, tingkat konvensional dan tingkat pasca konvensional.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Oboh (2019) tentang “*Personal and moral intensity determinants of ethical decision-making: A study of accounting professionals in Nigeria*”. Penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh intensitas pribadi dan moral terhadap proses pengambilan keputusan etis dalam profesi akuntansi di Nigeria. Penelitian tersebut juga menganalisis faktor-faktor sosio-demografis seperti jenis kelamin, usia, *home training*, dan status ekonomi yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan etis. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi etika dalam profesi akuntansi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan etis di kalangan profesional akuntansi di Nigeria. Keterbatasan pada penelitian tersebut salah satunya terdapat variabel lain yang juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan etis yang tidak ada pada penelitian tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Moral Relativisme, *Corporate Ethical Value*, dan *Probability Of Effect* terhadap *Ethical Judgement* dengan *Ethical Recognition* sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Sumedang)”. Kebaruan pada penelitian ini menambahkan *ethical recognition* sebagai mediasi terhadap *ethical judgement*. Pada penelitian Rest (1986) mengidentifikasi empat tahapan utama dalam proses pengambilan keputusan etis yaitu: pengakuan etis, penilaian etis, niat etis dan perilaku etis. Pengakuan etis sebagai langkah awal membantu individu atau organisasi membangun dasar yang kuat untuk penilaian etis yang lebih mendalam. Kesadaran terhadap isu-isu etika, serta pengakuan atasnya, membuat proses pengakuan etis dan penilaian etis menjadi lebih jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral relativisme, *corporate ethical value*, dan *probability of effect* terhadap *ethical judgement* dengan *ethical recognition* sebagai variabel mediasi di instansi pemerintahan Kabupaten Sumedang. Moral relativisme mengacu pada pandangan individu tentang sifat relatif atau subjektif dari nilai-nilai moral, sementara *corporate ethical value* adalah pandangan individu terhadap pentingnya etika dalam lingkungan organisasi dan *probability of effect* berkaitan dengan persepsi individu tentang kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan yang diambil.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah moral relativisme berpengaruh negatif terhadap *ethical judgement*?
2. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
3. Apakah *probability of effect* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
4. Apakah moral relativisme berpengaruh negatif terhadap *ethical recognition*?
5. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
6. Apakah *probability of effect* berpengaruh negatif terhadap *ethical recognition*?
7. Apakah *ethical recognition* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
8. Apakah moral relativisme berpengaruh negatif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?
9. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?
10. Apakah *probability of effect* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh moral relativisme terhadap *ethical judgement*?
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *probability of effect* terhadap *ethical judgement*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh moral relativisme terhadap *ethical recognition*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *corporate ethical value* terhadap *ethical recognition*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *probability of effect* terhadap *ethical recognition*.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *ethical recognition* terhadap *ethical judgement*.
8. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh moral relativisme terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi.
9. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi.

10. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *probability of effect* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai variabel mediasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta menjadi pelengkap referensi selanjutnya mengenai pengaruh moral relativisme, *corporate ethical value*, dan *probability of effect* terhadap *ethical judgement* dengan *ethical recognition* sebagai variabel mediasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti lainnya dalam memperluas pemahaman mereka tentang penilaian etis. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru, teori, dan metodologi yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan di bidang penilaian etis.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada staf atau karyawan yang bekerja di Instansi Pemerintah dalam memahami terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian etis di instansi pemerintah Sumedang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan apa saja yang dapat mempengaruhi *ethical judgement*.